

**ANALISA MODEL KEPEMIMPINAN KETUA KOMITE SEKOLAH DI SLB
DELISERDANG SEBAGAI MITRA PENGAWAL MUTU PENDIDIKAN
SEKOLAH TERKAIT**

Ye anny Suryadi¹, Denny Setiawan²

^{1,2}Pascasarjana Universitas Negeri Medan

E-mail: ¹ye anny.suryadi@gmail.com, ²denysetiawan1978@gmail.com

Abstrak: Mutu sebuah satuan pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk faktor sinergi antara sekolah dan komite sekolah sebagai mitranya. Tujuan kemitraan ini dapat tercapai dengan baik, bila masing-masing lembaga, organisasi menjalankan fungsinya dengan baik, termasuk fungsi yang harus dilakukan ketua komite sekolah sebagai pemimpin dari anggota komite itu sendiri, baik pada sekolah umum atau reguler, juga terhadap sekolah pendidikan khusus, SLB (Sekolah Luar Biasa). Penelitian ini membuktikan adanya hubungan baik yang dibangun oleh komite sekolah pada sebuah Sekolah Luar Biasa di Deliserdang dalam upaya pengawalan serta peningkatan mutu pendidikan terhadap anak didiknya dalam lingkungan sekolah terkait. Penelitian menyoroti bagaimana teori kepemimpinan yang ketua komite usung dalam kinerjanya menjalankan fungsi sebagai ketua komite terhadap tugas-tugas yang menjadi kewajiban komite terhadap sekolah. Penelitian ini bersifat kualitatif, dimana observasi, pengumpulan data dan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dilakukan pada bulan Februari 2023 di satuan pendidikan khusus, SLB di Deliserdang, dengan hasil ketua komite sekolah menggunakan teori kepemimpinan situasional dalam mengorganisir badan komite sekolah yang dipimpinnya.

Kata Kunci: komite sekolah; sekolah pendidikan khusus (SLB); teori kepemimpinan situasional

Abstrak: The quality of education in an educational unit is builded by many factors, including synergy factors between school and school's committee as the partner. For get the point of this relations, above committee as partner and schools as the institution of education, need to works as well as what being their job, include how committee chairman works with the funcion in the organization mean for get the point, objective of this relationship. This works deep intertwined must be happened not only for reguler school, but either for a special need school in extraordinary education, such SLB (Sekolah Luar Biasa), as an instituion wich teach disabilities students. This research proved, there was a good relation works has builded above special need school at Deliserdang as an institution of education, and the school's committee as partnerts, for carrying much oversee wich being the goal of this education institution. This research is also highlighting how the leadership theory of the chairman of the stretcher committee in his performance carries out the function as chairman of the committee for the tasks that are the responsibility of the committee towards schools. This is a qualitative research, wich observation and collecting data was doing in February 2023, in a special needs school, at Deliserdang, with result that's the chairman of the committee is using situasional model for managing the organitation (committee) as a partner for the school.

Keyword: school's committee; special needs school; situasional theory leadership model

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah proses yang terus berkesinambungan dalam tujuannya membangun individu yang beradab, guna membentuk masyarakat yang berbudi luhur, cerdas secara intelektual dan emosional, memiliki keterlampilan dan daya saing yang baik dalam memajukan bangsa. Pendidikan berfungsi memanusaiakan manusia, membentuk seorang individu menjadi sosok manusia beradab, mampu berpikir kritis, berakhlak (Pristiwanti, Bai Badariah, Hidayat, & Dewi, 2022). Melalui pendidikan yang diatur dalam undang-undang secara merata, tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mencapai masyarakat madani tidak dipengaruhi oleh diskriminasi sosial, ekonomi, suku dan budaya. Pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali bagi individu difabel (*different abled*) (Pramulia, 2021).

Melalui Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah ditegaskan bahwasanya pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam usaha mengembangkan pribadi siswa didiknya pada karakter religius, cerdas, berakhlak mulia, memiliki keterlampilan atas potensinya untuk bisa diabdikan pada keperluan diri sendiri, masyarakat dan negara (RI, Undang-Undang 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Sedang pemerataan pendidikan bagi adalah seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali kepada individu penyandang disabilitas (Solihah, 2016). Presiden Republik Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 menegaskan, mengenai pemenuhan diantaranya adalah pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas (RI, Bab III Hak Penyandang Disabilitas Pasal 5, 2016).

Sarana yang dijamin pemerintah guna pemenuhan kebutuhan pendidikan sebagai hak bagi disabilitas diatur pada pasal 40 ayat 2, dengan isi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dalam bentuk pendidikan inklusi dan pendidikan khusus. Satuan pendidikan khusus yang dimaksud diantaranya adalah SLB (Sekolah Luar Biasa). Undang – Undang yang menjadi dasar hukum negara Republik Indonesia telah menjamin kemerdekaan meraih pendidikan sebagai hak dasar bagi para difabel diseluruh lapisan masyarakat di Indonesia dimanapun berada.

Program wajib belajar 12 tahun bagi penyandang disabilitas merupakan langkah terbaik yang diambil pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan didik setiap insan, dalam tujuannya membentuk masyarakat madani yang utuh (Cahyaningsih, 2018). Program ini dilaksanakan melalui fasilitas pendidikan yang telah disediakan oleh pemerintah, dalam bentuk sekolah khusus (Tarnoto, 2016), meskipun pada kenyataannya sekolah khusus masih berada dalam jumlah terbatas, demikian dengan tenaga kependidikan dan sarana prasarana yang masih terus dikembangkan hingga saat ini.

Pada kenyataannya, lembaga pendidikan yang dibentuk pemerintah, tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan itu, dikarenakan bahkan pihak sekolah sendiri acapkali menjadi ‘ancaman’ bagi murid-muridnya dalam contoh kasus perudungan, bukan hanya terhadap sekolah pada umumnya, namun juga ancaman bagi para murid disabilitas pada sekolah pendidikan khusus (Roziqi, 2018). Terkait penyandang disabilitas, telah dilaporkan adanya tindak kekerasan fisik, psikis, perudungan bahkan intimidasi seksual dari pendidik, tenaga kependidikan atau sesama peserta didik. Pada tahun 2019, KPPA melaporkan, 12.031 anak sekitar 946 menjadi korban kekerasan dilingkungan sekolah. Ditahun selanjutnya terjadi penurunan yang merupakan imbas dari gerakan yang dilakukan Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak dalam rangka penyediaan sekolah ramah anak yang diawasi berlapis dari tingkat kota hingga daerah. Angka penurunan dari tindakan tersebut cukup signifikan, yaitu menjadi 619 korban kekerasan dari 12.482 anak, dan tahun 2021 menjadi 35 dari 1.355 anak korban mengalami kekerasan di lingkungan sekolah (Dikdasmen, 2021). Diantara langkah yang diambil oleh pihak pusat dan daerah dalam upayanya mencegah tindak

kekerasan pada penyandang disabilitas dan menjaga kualitas pendidikan, maka sekolah membentuk adanya komite sekolah sebagai pendukung pelayanan pendidikan sebagai mitra sekolah (Kemdikbud, 2017).

Pementukan komite sekolah telah diatur secara hukum, melalui Permendikbud Nomor 75 tahun 2016, pasal 3 ayat 1. Inspektur Jenderal Kemendikbud, disampaikan bahwasanya selain pada pasal 3 ayat 1 tersebut, komite sekolah juga memiliki tugas terhadap pengawasan kinerja sekolah, menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat. Hal ini memiliki makna bahwasanya komite sekolah merupakan kemitraan sekolah yang ikut serta dalam pengembangan kualitas sekolah (Mustadi, Zubaidah, & Sumardi, 2016), yang akan berpengaruh pada pengembangan individu berkualitas melalui sekolah sebagai media transformasi ilmu dan pendidikan, dengan tujuan perwujudan masyarakat yang berpendidikan.

Komite Sekolah merupakan wadah yang berfungsi sebagai mitra penghubung antara pihak sekolah dan masyarakat. Komite sekolah dibentuk sebagai badan mandiri dengan asas *non profit*, *non politis*, yang dibentuk secara musyawarah dengan tujuan ikut bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan sekolah. Secara umum, komite sekolah memiliki peran yang cukup kuat dalam membantu pihak sekolah menjalankan program-program sekolah dalam langkah meningkatkan mutu sekolah tersebut (Septiana, Bafadal, & Kusumaningrum, 2018).

Struktur Komite Sekolah

Berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) nomor 17 tahun 2010, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, disampaikan diantaranya:

- a. Anggota komite sekolah berjumlah sebanyaknya 15 orang, dengan rincian, sampai dengan 50 % merupakan orangtua siswa terkait. 30 % merupakan tokoh masyarakat (tokoh agama, RT/RW dan Camat). Ahli pelatihan sampai dengan 30 %, yang meliputi diantaranya penggiat pendidikan sesuai ahlinya, yang memiliki keperdulian dalam dunia pendidikan.
- b. Masa jabatan anggota Komite Sekolah adalah 3(tiga) tahun, dapat diperpanjang 1 (satu) periode.

Didalam struktur organisasi Komite Sekolah, terdiri atas personel yang telah ditentukan dari ketentuan yang berlaku, dengan setidaknya terdiri dari seorang Ketua, Sekertaris, Bendahara dan Anggota. Pemilihan personel dari komite sekolah dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, bahkan bila dipandang perlu, dipersilahkan untuk melakukan pemilihan secara terbuka melalui pemungutan suara. (RI, Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, 2010).

Dalam tugasnya mengemban amanah sebagai ketua komite sekolah, maka selain harus memahami fungsi dari keberadaan komite sekolah sebagai mitra sekolah tadi, ketua komite perlu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi anggotanya serta sekolah sebagai wadah mitra pendidikan anak-anaknya, dalam tujuan diantaranya (1) sebagai pemberi pertimbangan (*advisor agency*), masukan, serta rekomendasi kepada satuan pendidikan, agar sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan; (2) sebagai pendukung (*supporting agency*) baik dukungan finansial, ide dan gagasan, tenaga untuk penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, sebagai konsekuensi tujuan meningkatkan mutu pendidikan; (3) sebagai pengontrol (*controlling agency*) pengevaluasi atas kebijakan, dan program-program yang telah disepakati sebelumnya; (4) sebagai mediator, penghubung antara pihak sekolah dan masyarakat. 4 (empat) fungsi komite sekolah diatas diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya, untuk dapat mencapai tujuan bersama, yaitu peningkatan mutu pendidikan yang akan mempengaruhi perkembangan anak didik sebagai generasi masa depan bangsa.

Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah perilaku seseorang untuk dapat mempengaruhi, mengarah dan mengajak anggota dari yang dipimpinnya, untuk melakukan langkah-langkah guna mencapai tujuan dari organisasi atau tujuan dari kelompok yang dipimpin. Robert G Owens mengatakan bahwa kepemimpinan adalah keterlibatan yang dilakukan secara sengaja untuk mempengaruhi oranglain (Owens & Valesky, 2014). Kepemimpinan adalah seni dalam mengarahkan sekelompok orang dalam situasi yang beragam, untuk bisa mengerjakan suatu tujuan yang terorganisir demi tercapainya tujuan (Nur Khoironi & Abdulloh Hamid, 2020). Bagaimana keberhasilan seseorang yang dipilih menjadi pemimpin dalam menggerakkan, mempengaruhi anggotanya untuk dapat mencapai suatu tujuan, adalah suatu tindakan seni terorganisir yang merupakan kecakapan seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya didalam kepemimpinan. Alasan kebutuhan terhadap pemimpin sendiri dibagi menjadi 4 kebutuhan, yaitu (1) perlunya figur pemimpin dalam kelompoknya (2) perlunya wakil dalam mewakili atas nama kelompoknya (3) tempat pengalihan resiko atas tekanan terhadap kelompoknya (4) tempat meletakkan kekuasaan tertinggi dalam pengambilan suatu keputusan (Syarifudin, 2004).

Sedikitnya terdapat 3 teori kepemimpinan yang dikenal dengan *grand theory* (Widyani, 2019), diantaranya (1) kepemimpinan sifat. Teori ini mengangkat pendapat bahwasanya seorang pemimpin telah terlahir membawa bakat kepemimpinan sebagai gen yang merupakan bagian dari sifatnya sendiri. ;(2) kepemimpinan perilaku. Teori ini menepis tentang bagaimana faktor sifat dan gen mempengaruhi sifat kepemimpinan seseorang. Dalam teori perilaku, dikatakan siapa saja bisa menjadi pemimpin selama ia mau mempelajari perilaku untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Jadi semakin pemimpin tersebut membuka diri untuk ‘mengisi’ dirinya dengan keterlampilan-keterlampilan kepemimpinan, maka semakin kuat karakter kepemimpinan yang ada pada dirinya; (3) kepemimpinan situasional, adalah gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi atau keadaan.

Teori Kepemimpinan Sifat

Pada teori ini disampaikan tentang sosok pemimpin yang merupakan bawaan dari sifat pemimpin itu sendiri. Kemampuan kharismatik, intelektual, bahkan ciri-ciri dari fisik, merupakan bawaan yang ada pada sosok pemimpin sesuai dengan pembawaannya. Sifat-sifat tersebut telah dimilikinya dan tercermin dengan sendirinya atas perilaku kesehariannya, sehingga sosoknya dianggap mampu menjadi pemimpin.

Teori Kepemimpinan Perilaku

Hubungan anggota, dan lembaga terkait sangat mempengaruhi teori kepemimpinan perilaku. Teori kepemimpinan perilaku menyatakan keberhasilan seorang pemimpin dalam memimpin institusinya, dipengaruhi lingkungannya, dibentuk oleh lingkungannya.

Teori Kepemimpinan Situasional

Kepemimpinan situasional diciptakan oleh Hersey dan Blanchard pada tahun 1988. Gaya kepemimpinan situasional ‘bergerak’ berdasarkan kesiapan para anggotanya, menyalangkan antara kesiapan anggota dengan kebutuhan yang menjadi misi dari tujuan lembaga (Brahmasari, 2009). Kesiapan anggota menjadi acuan pemimpin dengan gaya situasional untuk melaksanakan langkah-langkah yang menjadi *agenda* pencapaian yang telah disusunnya.

Teori diatas kemudian membentuk dua jenis kepemimpinan, yaitu kepemimpinan transformasional dan transaksional. Pada model kepemimpinan transformasional, seorang pemimpin harus mampu secara perlahan memberikan kesadaran terhadap anggotanya, atau rekan kerjanya,

meningkatkan motivasinya, sehingga akhirnya mampu dan mau ikut melakukan yang menjadi tujuan dari lembaga/organisasi/kelompok tersebut, sesuai arahan sang pemimpin. Sedangkan model kepemimpinan transaksional, pemimpin ‘berkiblat’ pada *reward management by exception*. Pemberian reward oleh pemimpin sebagai langkah peningkatan kualitas dan kinerja dari anggota dan rekan kerja, dalam berbagai bentuk

METODE PENELITIAN

Penelitian berlangsung di sebuah satuan pendidikan khusus di Deliserdang, yaitu SLB.Mutiara Hati. SLB.Mutiara Hati adalah satuan pendidikan khusus, yang mendidik murid-murid disabilitas, diantaranya tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunalaras, tunadaksa dan autisme serta (spektrum yang ‘sepayung’ dengannya). Sekolah ini berdiri sejak tahun 2015. Jumlah keseluruhan murid pada sekolah ini yaitu 96 anak, dengan guru dan staf sebanyak 24 orang, termasuk staf kebersihan dan keamanan.

Penelitian berlangsung di sebuah satuan pendidikan khusus di Deliserdang, yaitu SLB.Mutiara Hati. SLB.Mutiara Hati adalah satuan pendidikan khusus, yang mendidik murid-murid disabilitas, diantaranya tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunalaras, tunadaksa dan autisme serta (spektrum yang ‘sepayung’ dengannya). Sekolah ini berdiri sejak tahun 2015. Jumlah keseluruhan murid pada sekolah ini yaitu 96 anak, dengan guru dan staf sebanyak 24 orang, termasuk staf kebersihan dan keamanan.

Penelitian ini bersifat kualitatif, dimana penelitian ini lebih mengarah pada fenomena yang berhubungan dengan kehidupan di masyarakat (Nugrahani, 2014), terkhususnya penelitian mengenai sikap seseorang, dalam hal ini sikap kepemimpinan komite sekolah. Karena bersifat pengamatan yang mendalam, dalam segi kehidupan, maka kejelian dan observasi yang kuat dari peneliti adalah kekuatan untuk hasil dan pembahasan terhadap penelitian ini (M.Firmansyah, Masrun, & I Dewa Ketut Yudha S, 2021). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung terhadap anggota dan ketua komite, serta pihak sekolah, seperti Kepala Sekolah, guru dan staf. Pengumpulan dokumen didapat dari sekolah, seperti nama-nama ketua, sekretaris, dan bendahara serta anggota komite yang terkait didalam.

Selain dari nama-nama anggota komite, dan nama staf serta guru dari sekolah terkait, penulis juga mengumpulkan dokumen berupa foto-foto rapat komite dengan para guru di sekolah. Observasi langsung dilakukan di bulan Febuari 2023, termasuk kegiatan wawancara dan pengumpulan dokumen yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti, didapatkan tidak ada keterbatasan gender untuk materi pemilihan Ketua Komite yang diambil berdasarkan musyawarah pihak sekolah dan pihak wali murid. Untuk penelitian tahun ini dibulan Febuari, merupakan penelitian terhadap ketua komite dalam periode 2020 / 2023. Karena sekolah ini baru dibuka ditahun 2015, pembentukan Komite Sekolah sendiri baru berlangsung ditahun 2018, dikarenakan jumlah siswa direntang waktu 2015 – 2020 masih sangat sedikit. Ketua komite ditahun kedua, masih merupakan orang yang sama diperiode ke pertama.

Ketua komite adalah seorang ayah dari salah seorang murid tunanetra yang cukup berprestasi dibidang tarik suara. Pemilihan atas ketua komite dilakukan secara musyawarah, dan diterima baik oleh pihak Kepala Sekolah. Ketua Komite memahami tugas dan tanggungjawab keberadaan komite

sebagai mitra bagi sekolah, termasuk didalamnya untuk ikut mendesain kurikulum yang kontekstual (Hanafi & Ma'sum, 2015), dalam hal ini komite telah ikut serta dalam penentuan tempat dan kegiatan yang ditawarkan sekolah pada kegiatan ekstrakurikuler. Mulai tahun 2020 sampai dengan 2022/23 belum ada keluhan yang disampaikan kepada sekolah melalui pihak komite, namun ada beberapa program baru yang diusung komite terhadap sekolah yang berhasil dilaksanakan, seperti bendahara komite bertanggungjawab atas sumbangan bagi musibah yang menimpa sesama wali murid, diluar sumbangan dari siswa sendiri. Pada masa pandemi covid-19, komite sekolah menyetujui proses pembelajaran yang telah ditetapkan secara daring *Study From Home* (SFH) (Handarini & Wulandari, 2020) dan ikut mengawasi sistem luring bagi siswa yang tidak memiliki telepon genggam.

Kepala sekolah di SLB.Mutiara Hati selalu membuka diskusi dengan pihak komite tentang diantaranya, tempat tujuan latihan sebagai program ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan, kegiatan mengisi bulan ramadhan, dan sebagainya. Komite melalui ketua komite telah melaksanakan acara mengumpulkan takjil berbuka puasa bersama untuk dibagikan kepada anak didik secara merata, sebagai penguat silaturahmi wali murid satu dengan lainnya. Demikian pada hari guru, komite melalui ketua, bendahara dan sekertaris selalu mengadakan acara potong tumpeng bagi para guru yang disediakan pihak komite sebagai penghormatan kepada guru sebagai pendidik buah hati mereka. Program-program yang direncanakan pihak komite baru mulai dirancang dan dilaksanakan mulai tahun 2022 disebabkan masalah pandemi yang menghambat banyak kegiatan.

Berkaitan dengan kegiatan sosial, sejak awal ketua komite bersama seluruh anggotanya, cukup aktif mengumpulkan dana kemandirian bagi wali murid. Data bantuan yang dikumpulkan diantaranya, bantuan pengumpulan dana terhadap salah seorang orangtua murid kelas III autisme, yang terkena musibah *stroke*, kelumpuhan akibat penyakit gula dan hipertensi (Puspitasari, 2020). Selain mengumpulkan dana bantuan karena musibah sakit, rawat inap siswa (typus, demam berdarah, kecelakaan sepeda motor, meninggalnya wali murid lain serta siswa lain), telah dilakukan pengumpulan dana bantuan terhadap kebakaran yang menimpa siswa autisme di sekolah tersebut.

Program-program yang disusun ketua komite bersama anggotanya, menandakan ketua komite memiliki karakter teori kepemimpinan situasional, dengan jenis kepemimpinan transformasional. Situasional yang dimaksud adalah, ketua komite telah menunjukkan perannya dalam mengikuti iklim sekolah, namun tetap mengawal mutu pendidikan sekolah dengan kepemimpinan transformasional yaitu membuat kebijakan-kebijakan baru sesuai keadaan dan kebutuhan (Wahyudi, Dwiyani, & Sarino, 2018). Contoh pada masa kondisi masyarakat yang kala itu dipengaruhi oleh masa pandemi, ketua komite memang terkesan pasif namun tetap ikut dalam pengawasan terhadap usaha pembelajaran daring (dalam jaringan) yang dilaksanakan kala itu. Ketua komite berhasil menggerakkan anggota komite untuk ikut menyetujui pembelajaran secara daring dimasa pandemi demi keamanan bersama, dan pembelajaran secara *hybrid* saat pandemi mulai reda di tahun 2021/2022. Ketua komite saat itu aktif melakukan pengawasan terhadap pemberian paket pulsa kepada siswa-siswi SLB secara merata, serta ikut menyampaikan keadaan beberapa siswa yang memiliki kondisi dibawah garis ekonomi menengah kebawah dengan kondisi tidak memiliki *android*, sehingga mengharapakan kebijaksanaan lain, yaitu luring (luar jaringan) secara individual bersama guru di sekolah seusai protokol kesehatan yang berlaku kala itu.

Sejauh ini, belum ada program pengumpulan dana dari pihak wali murid yang dikelola oleh bendahara komite dalam usahanya membantu kesediaan sarana dan prasarana sekolah. Pihak komite sekolah hingga saat ini memiliki program rutin pemeriksaan kesehatan dan pemberian vitamin

terhadap murid-murid SLB gratis secara rutin, hal ini berkaitan karena adanya wali murid yang berprofesi sebagai dokter dan secara sadar ingin ikut terlibat dalam menjaga kesehatan murid-murid di SLB tersebut. Ketua komite belum bisa membuat program-program baru yang memerlukan biaya lebih dikarenakan kondisi perekonomian wali murid di sekolah tersebut berada pada garis ekonomi menengah kebawah atau termasuk dalam kelompok ekonomi lemah (kbbi, n.d.), yang rata-rata orangtua dari wali murid bekerja sebagai pedagang kecil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan, kepemimpinan ketua komite dalam menjalankan fungsinya sebagai mitra sekolah selain dipengaruhi oleh gaya kepemimpinannya, juga dipengaruhi oleh kondisi anggota yang ia miliki, dan keadaan saat ia memimpin. Pergerakan kreatif yang dimiliki ketua dengan program-program cemerlang harus didukung dan dikerjakan secara gotong royong oleh seluruh komite, sehingga dapat tercapai secara efektif. Keberadaan komite sekolah sebagai mitra lembaga pendidikan terus diperlukan dalam mengawal mutu pendidikan itu sendiri demi terwujudnya individu yang beradab, berakhlak dan kompetitif. Kedepannya, tentu diharapkan akan terus dilakukan penelitian-penelitian yang mengupas tentang kepemimpinan terutama dalam lingkup fungsi dan gerak komite sekolah, sehingga dapat memicu perkembangan kemitraan ini lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2020). Pembelajaran Online Berbasis Proyek Salah Satu Solusi Kegiatan Belajar Mengajar di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 64-70.
- Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R. W., Krajcik, J. S., Guzdial, M., & Palincsar, A. (1991). Motivating Project-Based Learning: Sustaining the Doing, Supporting the Learning. *Educational Psychologist*, 369-398.
- Brahmasari, I. A. (2009). Pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan Situasional dan Pola Komunikasi terhadap Disiplin Kerja dan Kinerja Karyawan pada PT Central Proteinaprima Tbk. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 240.
- Cahyaningsih, R. I. (2018). PENDISTRIBUSIAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP). *Didaktik : Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 152.
- Dikdasmen. (2021, Maret 26). *Melindungi dan Menjamin Hak-hak Anak Penyandang Disabilitas*. Retrieved from <http://ditpsd.kemdikbud.go.id> : <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/melindungi-dan-menjamin-hak-hak-anak-penyandang-disabilitas>
- Fester, J. (2018, January 24). *PBL Works*. Retrieved from www.pblworks.org: <https://www.pblworks.org/blog/easy-spices-using-right-technology-support-pbl-teaching>
- Hanafi, I., & Ma'sum, M. (2015). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN: PERAN KOMITE SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN. *Jurnal Ilmiah Pendidikan: Cakrawala Pendidikan*, 59.

- Handarini, O. I., & Wulandari, S. S. (2020). Pembelajaran Daring Sebagai Upaya Study From Home(SFH) Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran(JPAP)*, 497.
- kbki. (n.d.). *ekonomi-lemah*. Retrieved from <https://kbki.lektur.id>: <https://kbki.lektur.id/ekonomi-lemah>
- Kemdikbud. (2017, Januari 18). *Bukan Hanya Menggalang Dana, Ini Tugas Komite Sekolah Sebenarnya*. Retrieved from <https://www.kemdikbud.go.id/>: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/01/bukan-hanya-menggalang-dana-ini-tugas-komite-sekolah-sebenarnya>
- Kokotsaki, D., Menzies, V., & Wiggins, A. (2016). Project-based learning: a review of the literature. *Improving schools*, 267-277.
- M.Firmansyah, Masrun, & I Dewa Ketut Yudha S. (2021). Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif. *Elastisitas – Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 158.
- Miftah, M. Z. (2016). Implementing Project-Based Learning in Scientific Writing Class. *Education Proceeding Developing Curriculum, Teacher, and Instruction for Quality English Linguistic, Literature and Education* (pp. 384-392). Pekanbaru: Lite Conference 2016.
- Mustadi, A., Zubaidah, E., & Sumardi. (2016). PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DASAR. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 313.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Nur Khoironi, & Abdulloh Hamid. (2020). KEPEMIMPINAN SITUASIONAL DALAM PENDIDIKAN ISLAM. *Jurnal MUDARRISUNA*, 670.
- Nurohman, S. (2007). Pendekatan Project Based Learning Sebagai Upaya Internalisasi Scientific Method Bagi Mahasiswa Calon Guru Fisika. 1-20. Retrieved from <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/132309687/project-based-learning.pdf>
- Owens, R., & Valesky, T. (2014). *Organizational Behavior in Education: Leadership and School Reform*. Boston: Pearson.
- Pramulia, P. (2021). Masyarakat Disabilitas Dalam Peradaban Jawa. *Pana Pramulia*, 38.
- Pristiwanti, D., Bai Badariah, Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 7912.
- Puspitasari, P. N. (2020). Hubungan Hipertensi Terhadap Kejadian Stroke. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 923.
- RI, P. (2003). *Undang-Undang 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Indonesia: DPR RI dan Presiden RI.
- RI, P. (2010). *Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan*. Indonesia: Republik Indonesia.

- RI, P. (2016). *Bab III Hak Penyandang Disabilitas Pasal 5*. Indonesia: Presiden RI.
- Roziqi, M. (2018). Perlawanan Siswa Disabilitas Korban Perundungan: Sebuah Studi Fenomenologi. *Jurnal Psikoedukasi dan Konseling*, 24.
- Septiana, D. N., Bafadal, I., & Kusumaningrum, D. E. (2018). PELIBATAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN. *JAMP Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 294.
- Solihah, I. (2016). KEBIJAKAN BARU: JAMINAN PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS. *Jurnal Kemensos Sosio Informa*, 166.
- Syarifudin, E. (2004). TEORI KEPEMIMPINAN. *Al Qalam*, 460.
- Tarnoto, N. (2016). PERMASALAHAN-PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI PADA TINGKAT SD. *HUMANITAS*, 51.
- Wahyudi, 2. d., Dwiyani, D., & Sarino, A. (2018). GAYA KEPEMIMPINAN SITUASIONAL KEPALA SEKOLAH DAN MOTIVASI KERJA GURU SEBAGAI DETERMINAN. *Manajerial*, 86.
- Widyani, A. (2019). SEORANG PEMIMPIN DALAM MENENTUKAN ARAH MANAJEMEN YANG BAIK. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11.
- Yam, L. H. (2010). Implementing a Project-Based Learning Approach in an Introductory Property Course. *Doctoral Dissertation, 16th Pacific Rim Real Estate Society Conference*, 1-19.